

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Definisi akuntansi menurut Arens (2008:7) adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan.

Definisi lain menurut Mulyadi (2006:1) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, penggolongan, pengukuran, pengolahan dan penyajian data transaksi sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

2.1.1.2 Jenis-jenis Akuntansi

Akuntansi terdiri atas beberapa jenis yang digolongkan berdasarkan kriteria tertentu. Menurut Carter dan Usry (2006:25) berdasarkan entitas penyusunan laporan keuangan, akuntansi terbagi menjadi akuntansi sektor privat dan sektor publik. Organisasi perusahaan/bisnis menggunakan akuntansi sektor

privat, sedangkan untuk akuntansi sektor publik digunakan dalam sektor pemerintahan dan perusahaan non profit/nirlaba.

Sedangkan penggolongan berdasarkan pemakai laporan keuangan, terdiri atas akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan menyajikan laporan keuangan yang digunakan oleh pihak eksternal. Akuntansi manajemen menyajikan informasi yang digunakan oleh pihak internal perusahaan.

2.1.2 Audit

2.1.2.1 Definisi Audit

Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan utama untuk memperoleh laba disamping beberapa tujuan lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka semua tahap kegiatan yang akan dilaksanakan harus direncanakan, dianalisa, dan diteliti secara seksama terlebih dahulu oleh mereka yang bertanggung jawab.

Dengan makin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada perusahaan, maka ruang lingkup dan luasnya tugas yang dipikul oleh manajemen semakin bertambah besar. Oleh karena itu manajemen memerlukan alat bantu yang dapat digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. Salah satu alat bantu dalam melaksanakan fungsi utama manajemen, fungsi pengawasan dan pengendalian adalah aktivitas audit.

Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntansi publik sebagai yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4)

“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Adapun pengertian audit menurut Alvin A. Arens, Mark S. Basley dan Randal J. Elder (2011:4)

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Definisi lain menyebutkan bahwa auditing adalah proses yang ditempuh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Untuk melakukan audit harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar dari kriteria yang digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut dan memiliki banyak bentuk. Para auditor secara rutin melakukan audit atas informasi yang dapat diukur termasuk laporan keuangan perusahaan dan SPT pajak penghasilan perorangan. Auditor juga mengaudit informasi yang lebih subjektif seperti efektivitas sistem komputer dan efisiensi operasi manufaktur.

2.1.2.2 Jenis-jenis Audit

Beberapa jenis audit dilakukan untuk memastikan bahwa proses operasi di dalam perusahaan telah berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku serta pengelolaan terhadap sumber daya dalam proses tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Arens et al (2008:16) ada tiga jenis audit, yaitu:

- “1. *Financial Statement*
2. *Operational Audit*
3. *Compliance Audit*”

Adapun penjelasan dari jenis-jenis audit di atas sebagai berikut:

1. *Financial Statement*

Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan dengan tujuan memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan kriteria yang tertentu.

2. *Operational Audit*

Pemeriksaan operasional adalah suatu tinjauan terhadap setiap bagian prosedur atau metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitas kegiatan entitas tersebut. Pada akhir pemeriksaan operasional biasanya diajukan saran-saran rekomendasi pada manajemen untuk meningkatkan kualitas operasi perusahaan.

3. *Compliance Audit*

Pemeriksaan ketaatan merupakan proses pemeriksaan atas ketaatan pelaksanaan suatu prosedur atau peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, baik pihak atasan perusahaan maupun pemerintah.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:10) ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas pemeriksaan umum (*General Audit*) dan pemeriksaan khusus.

Berikut ini penjelasan mengenai kedua macam audit tersebut:

1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik dan memperhatikan kode etik akuntan Indonesia, aturan etika KAP yang telah disahkan Ikatan Akuntan Indonesia serta standar pengendalian mutu.

2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan *Auditee*) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhirnya pemeriksaan auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang

dilakukan juga terbatas. Misalnya KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjuakan dan penerimaan kas. Pada akhir pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terhadap penagihan piutang usaha perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operandinya.

Sedangkan ditinjau dari jenis pemeriksaan, menurut Sukrisno Agoes (2012:11) audit bisa dibedakan atas:

- “1. Management Audit (*Operational Audit*)
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)
3. Pemeriksaan Intern (*Intern Audit*)
4. *Computer Audit*”.

Berikut penjelasan dari tiga jenis audit di atas adalah:

1. Management Audit (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Pengertian efisien disini adalah, dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Efektif adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau berhasil/dapat bermanfaat sesuai dengan waktu

yang telah ditentukan. Ekonomis adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam, bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan oleh KAP maupun bagian *Internal Audit*.

3. Pemeriksaan Intern (*Intern Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal Auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak di luar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (*audit finding*) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya (*recommendations*).

4. *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP)* sistem.

Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan akan tercapai, audit internal secara terus menerus memerlukan pengawasan dari manajemen untuk menentukan apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, fungsi pengawasan ini kurang dapat dilaksanakan dengan baik, karena jangkauan dan ruang lingkup yang akan dikendalikan semakin luas dan kompleks sehingga kemampuan manajemen dirasakan sangat terbatas. Untuk itu manajemen memerlukan bagian khusus dalam perusahaan untuk melakukan penilaian atas pengendalian intern dan aktivitas-aktivitas perusahaan. Bagian ini disebut sebagai Audit Internal. Audit Internal harus dilakukan oleh seorang yang bebas dari pengaruh departemen atau bagian-bagian lain yang diperiksanya.

2.1.3 Audit Internal

2.1.3.1 Definisi Audit Internal

Audit Internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Perlunya konsep Audit Internal dikarenakan bertambah luasnya ruang lingkup perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin luas pula rentang pengendalian yang dipikul pimpinan. Audit Internal yang dilakukan dalam suatu perusahaan merupakan kegiatan

penilaian dan verifikasi atas prosedur-prosedur, data yang tercatat berdasarkan atas kebijakan dan rencana perusahaan, sebagai salah satu fungsi dalam upaya mengawasi aktivitasnya.

Valery G. Kumaat (2011:35) mendefinisikan bahwa:

“Audit Internal adalah agen yang paling “pas” untuk mewujudkan *Internal Control, Risk Management, dan Good Corporate Governance* yang pasti akan memberi nilai tambah bagi sumber daya dan perusahaan”.

Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:136) Audit Internal yaitu:

“Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes”.

Selain itu Hery (2010:20) menjelaskan bahwa Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan.

Dari beberapa definisi di atas sudah jelas bahwa Audit Internal merupakan jaminan, independen, obyektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan efektifitas kegiatan operasi perusahaan.

2.1.3.2 Tujuan Audit Internal

Menurut Hery (2010:39) tujuan Audit Internal adalah:

“Audit Internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggungjawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran, dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa”.

Menurut (Hery, 2010:46), untuk mencapai keseluruhan tujuan tersebut, maka auditor harus melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- “1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
2. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa sampai sejauhmana aktiva perusahaan dipertanggungjawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
4. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Menilai prestasi kerja para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan”.

Adapun menurut Hery (2010:54) aktivitas dari Audit Internal yang disebutkan di atas digolongkan menjadi dua macam yaitu *financial auditing* dan *operational auditing*.

Berikut ini penjelasan dari kedua macam audit internal di atas:

1. *Financial Auditing*

Kegiatan ini antara lain mencakup pengecekan atas kecermatan dan kebenaran segala data keuangan, mencegah terjadinya kesalahan atau *fraud* dan menjaga perusahaan.

2. *Operational Auditing*

Kegiatan pemeriksaan ini lebih ditujukan pada operasional untuk dapat memberikan rekomendasi yang berupa perbaikan dalam cara kerja, sistem pengendalian, dan sebagainya.

2.1.3.3 Ruang Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup audit internal yang dikemukakan Sawyer (2005:10) adalah sebagai berikut:

“Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan operasi telah akurat dan dapat diandalkan, (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi, (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti, (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi, (5) sumber daya telah digunakan secara efektif, semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggungjawabnya secara efektif”.

Berdasarkan *Statement Responsibilities of Internal Auditor*, ruang lingkup audit internal meliputi:

1. Penelaahan atas keandalan dan kejujuran informasi keuangan dan operasi serta metoda yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
2. Penelaahan sistem yang ada untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat membawa dampak yang penting bagi operasi dan pelaporan, serta menentukan apakah organisasi dan pelaporan, serta menentukan apakah organisasi sudah mengikuti hal tersebut.
3. Penelaahan cara-cara pengamanan harga dan selanjutnya menelusuri keberadaan harga tersebut.
4. Penilaian keefisienan dan keekonomisan penggunaan sumber daya.

5. Mereview operasi dan program untuk memastikan apakah hasilnya telah konsisten dengan tujuan yang telah ditetapkan dan apakah operasi dan program tersebut telah dijadikan dasar penyusunan rencana.

Dari hal tersebut di atas diharapkan dapat mendorong tercapainya pekerjaan pemeriksaan yang memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui oleh *top management* dan dewan direksi, serta pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar profesi auditor internal.

2.1.3.4 Unsur-unsur Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2005), tiga unsur dalam Audit Internal yaitu:

“1. Memastikan/memferifikasi (*Verification*)

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan atas kebenaran data dan informasi yang dihasilkan dari suatu sistem akuntansi sehingga dapat dihasilkan laporan akuntansi yang akurat yaitu cepat dan dapat dipercaya. Catatan yang telah diverifikasi dapat ditentukan oleh Audit Internal tertentu apakah terdapat kekurangan dan kelemahan dalam prosedur pencatatan untuk diajukan saran-saran perbaikan.

2. Menilai/mengevaluasi (*Evaluation*)

Merupakan aktivitas penilaian secara menyeluruh atas pengendalian intern akuntansi keuangan dari kegiatan menyeluruh berdasarkan kriteria yang sesuai. Hal ini merupakan suatu cara untuk memperoleh kesimpulan yang menyeluruh dari kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan.

3. Rekomendasi (*Recommendation*)

Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan terhadap ketaatan pelaksanaan dan prosedur operasi, prosedur akuntansi, kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan (tindakan korektif kepada manajemen), sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Audit Internal, yaitu memastikan/memverifikasi (*verification*), menilai, mengevaluasi (*evaluation*), dan rekomendasi (*recommendation*)”.

2.1.3.5 Tanggung jawab dan Kewenangan Audit Internal

Audit Internal mempunyai tanggung jawab dan kewenangan audit atas penyediaan informasi untuk menilai keefektifan Sistem Pengendalian Internal dan mutu pekerjaan organisasi perusahaan.

Oleh karena itu, kepala bagian Audit Internal harus menyiapkan uraian tugas yang lengkap mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian Audit Internal. Hal ini sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) (2004:8) tentang Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung jawab Audit Internal.

“Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi Audit Internal harus dinyatakan secara formal dalam *charter* Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi”.

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Audit Internal di dalam organisasi perusahaan harus dinyatakan secara jelas dalam dokumen tertulis yang formal dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Dokumen tersebut harus menjelaskan tujuan dari bagian Audit Internal, khususnya ruang lingkup audit. Namun demikian, bagian Audit Internal tidak memiliki tanggung jawab atau kewenangan terhadap aktivitas yang diauditnya.

2.1.3.6 Standar Profesional Audit Internal

Menurut Hery (2010:73) standar profesional Audit Internal terbagi atas empat macam, diantaranya yaitu:

- “1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan”.

Adapun penjelasan dari keempat standar profesional Audit Internal tersebut adalah:

1. Independensi

Adanya sifat mandiri, dimana audit harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Auditor Internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian Audit Internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Hal ini hanya dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para audit internal. Status organisasi Audit Internal harus dapat memberikan keleluasaan bagi Audit Internal dalam menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan secara maksimal.

2. Kemampuan Profesional

a. Pengetahuan dan kemampuan

Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh Audit Internal. Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan Audit Internal haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki

pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

b. Pengawasan

Pimpinan Audit Internal bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh para stafnya. Pengawasan yang dilakukan sifatnya berkelanjutan, yang dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penyimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Pengawasan yang dimaksud mencakup:

- Memberikan instruksi kepada para staf Audit Internal pada awal pemeriksaan dan menyetujui program-program pemeriksaan.
- Melihat apakah program pemeriksaan yang telah disetujui dilaksanakan, kecuali bila terjadi penyimpangan yang dibenarkan atau disalahkan.
- Menentukan apakah kertas kerja pemeriksaan telah cukup untuk mendukung temuan pemeriksaan, kesimpulan-kesimpulan, dan laporan hasil pemeriksaan.
- Meyakinkan apakah laporan pemeriksaan tersebut akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, dan tepat waktu.
- Menentukan apakah tujuan pemeriksaan telah dicapai.

c. Ketelitian Profesional

Audit Internal harus bekerja secara teliti dalam melaksanakan pemeriksaan. Audit Internal harus mewaspadai berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan sengaja, kesalahan, kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan (ketidakefisienan), dan konflik kepentingan.

3. Lingkup Pekerjaan

a. Keandalan informasi

Audit Internal haruslah menguji sistem informasi tersebut, dan menentukan apakah berbagai catatan, laporan finansial, dan laporan operasional perusahaan mengandung informasi yang akurat, dapat dibuktikan kebenarannya, tepat waktu, lengkap, dan berguna.

b. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan sistem, yang dibuat dengan tujuan memastikan pemenuhan berbagai persyaratan, seperti kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan. Audit Internal bertanggung jawab untuk menentukan apakah sistem tersebut telah cukup efektif dan apakah berbagai kegiatan yang diperiksa telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

c. Perlindungan aktiva

Audit Internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi aktiva perusahaan terhadap berbagai jenis kerugian, seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, dan kegiatan yang ilegal. Pada saat memverifikasi keberadaan suatu aktiva, Audit Internal harus menggunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.

d. Penggunaan sumber daya

Audit Internal harus dapat memastikan keekonomisan dan keefisienan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Audit Internal bertanggung jawab untuk:

- Menetapkan suatu standar operasional untuk mengukur keekonomisan dan efisiensi
- Standar operasional tersebut telah dipahami dan dipenuhi
- Berbagai penyimpangan dari standar operasional telah diidentifikasi, dianalisis, dan diberitahukan kepada berbagai pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tindakan perbaikan.

e. Pencapaian tujuan

Audit Internal harus dapat memberikan kepastian bahwa semua pemeriksaan yang dilakukan sudah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

a. Perencanaan kegiatan pemeriksaan

Audit Internal harus terlebih dahulu melakukan perencanaan pemeriksaan dengan meliputi:

- Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan
- Memperoleh informasi dasar tentang objek yang akan diperiksa
- Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan
- Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu
- Melakukan survey secara tepat untuk lebih mengenali bidang atau area yang akan diperiksa
- Penetapan program pemeriksaan
- Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil pemeriksaan disampaikan
- Memperoleh persetujuan atas rencana kerja pemeriksaan

b. Pengujian dan pengevaluasian

Audit Internal harus melakukan pengujian dan pengevaluasian terhadap semua informasi yang ada guna memastikan ketepatan dari informasi tersebut yang nantinya akan digunakan untuk pemeriksaan.

c. Pelaporan hasil pemeriksaan

Audit Internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Laporan yang dibuat haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu.

- Laporan yang objektif adalah laporan yang faktual, tidak berpihak, dan terbebas dari distorsi.
- Laporan yang jelas adalah laporan yang mudah dimengerti dan logis.
- Laporan yang singkat adalah laporan yang diringkas langsung membicarakan pokok permasalahan dan menghindari berbagai perincian yang tidak diperlukan.
- Laporan yang konstruktif adalah laporan yang berdasarkan isi dan sifatnya akan membantu pihak yang diperiksa dan organisasi serta menghasilkan berbagai perbaikan yang diperlukan.
- Laporan yang tepat waktu adalah laporan yang pemberitannya tidak ditunda dan mempercepat kemungkinan pelaksanaan berbagai tindakan yang koreksi dan efektif. Audit Internal juga harus langsung melaporkan hasil pemeriksaannya kepada pimpinan dan karyawan lain apabila membutuhkan.

d. Tindak lanjut pemeriksaan

Audit Internal harus secara terus menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan apakah suatu tindakan perbaikan telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan. Tindak lanjut Audit Internal didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan.

2.1.3.7 Peranan Audit Internal

Mengingat pentingnya peran pengawasan terhadap tindak *fraud*, maka Audit Internal menjadi satu-satunya unit kerja yang paling tepat melakoninya. Karena itu, peran Audit Internal yang selama ini selalu berkaitan dengan urusan *physical control* harus sudah bergeser dari sekedar terkesan sebagai "provost" perusahaan menjadi unit yang mampu berperan dalam pencegahab sekaligus pendeteksian *fraud*.

Menurut Valery G. Kumaat (2011:34), Audit Internal dituntut waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya *fraud*, yang mencakup:

- “1. Identifikasi titik-titik kritis terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*.
2. Penilaian terhadap sistem pengendalian yang ada, dimulai sejak lingkungan pengendalian hingga pemantauan terhadap penerapan sistem pengendalian”.

Seandainya terjadi *fraud*, Audit Internal bertanggung jawab untuk membantu manajemen mencegah *fraud* dengan melakukan pengujian dan evaluasi keandalan dan efektivitas dari pengendalian, seiring dengan potensi risiko terjadinya *fraud* dalam berbagai segmen. Tidak hanya manajemen puncak, Audit Internal juga harus mendapat sumber daya yang memadai dalam rangka memenuhi misinya untuk mencegah *fraud*.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2009:38), tanggung jawab Audit Internal dalam rangka mendeteksi kecurangan, selama penugasan audit termasuk:

- “1. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang kecurangan, dalam rangka mengidentifikasi indikasi-indikasi yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh anggota organisasi.
2. Memiliki sensitivitas yang berkaitan dengan kemungkinan adanya kesempatan terjadinya kecurangan.
3. Melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator yang mungkin dapat memberikan peluang terjadinya kecurangan dan menentukan apakah perlu diadakan investigasi lanjutan.
4. Menentukan prediksi awal terjadinya suatu kecurangan.
5. Melakukan penilaian kembali terhadap pelaksanaan pengendalian di lingkungan dimana terjadinya tindak kecurangan dan selanjutnya menentukan upaya untuk memperkuat pengendalian di dalamnya”.

2.1.4 Kecurangan (*Fraud*)

2.1.4.1 Definisi Kecurangan (*Fraud*)

Pada kenyataannya kecurangan (*fraud*) hampir terdapat di setiap lini pada organisasi, mulai dari jajaran manajemen sampai kepada jajaran pelaksana bahkan bisa sampai ke pesuruh (*office boy*). Kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh pegawai yang tampaknya jujur sekalipun.

Pelaku tindak kecurangan (*fraud*) adalah “manusia” dengan berbagai alasan dari dalam dirinya untuk melakukan tindakan tercela (Valery G. Kumat, 2011:135).

Selain itu Amin Widjaja Tunggal (2009:1) berpendapat bahwa kecurangan adalah: “Penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberikan manfaat keuangan pada si penipu.”

Secara garis besar maka *fraud* dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan untuk menyembunyikan, menutupi atau tindakan tidak jujur lainnya, melibatkan atau meniadakan suatu perbuatan atau membuat pernyataan

yang salah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan keuangan lainnya atau meniadakan suatu kewajiban.

Kecurangan (*fraud*) pada dasarnya merupakan serangkaian ketidakberesan (*irregularities*) dan perbuatan melawan hukum (*illegal act*) yang dilakukan oleh orang luar atau orang dalam perusahaan guna mendapatkan keuntungan dan merugikan orang lain. Kecurangan yang bertujuan menghasilkan keuntungan bagi organisasi pada umumnya menghasilkan suatu keuntungan secara tidak jujur atau tidak wajar yang mungkin dapat pula menimbulkan kerugian bagi pihak lain di luar organisasi. Pelaku jenis kecurangan ini memperoleh keuntungan secara tidak langsung, karena pada umumnya keuntungan pribadi akan bertambah bila organisasi mendapatkan keuntungan.

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang melanggar hukum dan bisa merugikan berbagai pihak. Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu hal yang sangat sulit diberantas, bahkan korupsi di Indonesia sudah dilakukan secara sistematis sehingga perlu penanganan yang sistematis juga. Akan tetapi, kita harus optimis bahwa kecurangan (*fraud*) bisa dicegah atau paling sedikitnya bisa dikurangi dengan menetapkan pengendalian anti kecurangan (*fraud*).

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa kecurangan (*fraud*) berarti bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar, apabila suatu kesalahan disengaja maka kesalahan tersebut merupakan *fraud (fraudulent)*. *Fraud auditing* hendaknya disebut dengan istilah audit atas *fraud*, yang dapat didefinisikan sebagai audit khusus yang dimaksudkan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau *fraud* atas

transaksi keuangan. *Fraud auditing* termasuk dalam audit khusus yang berbeda dengan audit umum dalam hal tujuan yaitu *fraud auditing* mempunyai tujuan yang lebih sempit (khusus) dan cenderung untuk mengungkap suatu *fraud* yang diduga terjadi dalam pengelolaan aset/aktiva.

2.1.4.2 Kondisi Penyebab Kecurangan (*Fraud*)

Amin Widjaja Tunggal (2012:10) menyatakan bahwa terdapat beberapa kondisi penyebab *fraud*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- “1. Insentif atau tekanan. Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud*.
2. Kesempatan. Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan *fraud*.
3. Sikap atau rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur”.

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa kondisi penyebab *fraud* itu diantaranya disebabkan oleh adanya insentif/tekanan, kesempatan, dan juga sikap atau rasionalisasi. Insentif yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan adalah menurunnya prospek keuangan perusahaan.

Kesempatan meskipun laporan keuangan semua perusahaan mungkin saja menjadi sasaran manipulasi, risiko bagi perusahaan yang berkecimpung dalam industri yang melibatkan pertimbangan dan estimasi yang signifikan jauh lebih besar.

Sikap/rasionalisasi sikap manajemen puncak terhadap pelaporan keuangan merupakan faktor risiko yang sangat penting dalam menilai kemungkinan laporan keuangan yang curang.

2.1.4.3 Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan (*Fraud*)

Fraud umumnya terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan dan dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut. Faktor pendorong *fraud* boleh diartikan sebagai pola pemanfaatan “kesempatan/peluang” untuk mengambil keuntungan melalui cara-cara yang merugikan.

Valery G. Kumat (2011:139) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya *fraud* adalah sebagai berikut:

- “1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan “celah” risiko.
2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (*common business sense*) yang berlaku.
3. Pemantauan (pengendalian) yang tidak konsisten terhadap implementasi *business process*.
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap *business process* yang berlaku”.

Simanjuntak (2008:4) dalam Nur Asiah (2012) menyatakan terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yang disebut juga dengan teori *GONE*, yaitu:

- “1. *Greed* (keserakahan)
2. *Opportunity* (kesempatan)
3. *Need* (kebutuhan)
4. *Exposure* (pengungkapan)”.

Greed dan *Need* termasuk dalam faktor individu yang merupakan hal yang bersifat sangat personal dan di luar kendali perusahaan sehingga sulit sekali dapat dihilangkan oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya alasan kebutuhan ditambah dengan motivasi yang mendorongnya, maka sikap serakah seseorang akan cenderung melanggar ketentuan dan aturan.

Opportunity dan *Exposure* disebut sebagai faktor genetik karena merupakan faktor yang masih di dalam kendali perusahaan sebagai korban perbuatan *fraud*. Pada umumnya terdapatnya kesempatan akan mendorong seseorang untuk berbuat *fraud* karena pelaku cenderung berpikir bahwa kapan lagi ada kesempatan jika tidak sekarang. Sementara *exposure* berkaitan dengan proses pembelajaran berbuat curang karena menganggap sanksi terhadap pelaku *fraud* tergolong ringan sehingga para karyawan perusahaan tidak merasa takut apabila melakukan *fraud*.

Pada umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan *fraud* adalah tekanan, baik itu tekanan finansial maupun non finansial yang didukung dengan adanya kesempatan karena perusahaan tidak menindak tegas pelaku *fraud* sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelaku *fraud*.

2.1.4.4 Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Kasus kecurangan (*fraud*) yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Apabila *fraud* tidak bisa dideteksi dan dihentikan, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan. Untuk itu, manajemen

perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*).

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:13), pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*.

Pusdiklatwas BPKP (2008:38) menyatakan beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup beberapa langkah berikut:

- “1. Penetapan kebijakan anti *fraud*
2. Prosedur pencegahan baku
3. Organisasi
4. Teknik pengendalian
5. Kepekaan terhadap *fraud*”.

Adapun penjelasan dari langkah-langkah metode pencegahan kecurangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan anti *fraud*

Kebijakan unit organisasi harus memuat *a high ethical tone* dan harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah tindakan-tindakan *fraud* dan kejahatan ekonomi lainnya. Seluruh jajaran manajemen dan karyawan harus mempunyai komitmen yang sama untuk menjalankannya sehingga kebijaksanaan yang ada akan dilaksanakan dengan baik.

2. Prosedur pencegahan baku

Pada dasarnya komitmen manajemen dan kebijakan suatu instansi/organisasi merupakan kunci utama dalam mencegah dan mengatasi *fraud*. Namun demikian, harus pula dilengkapi dengan

prosedur penanganan pencegahan secara tertulis dan ditetapkan secara baku sebagai media pendukung. Secara umum prosedur pencegahan harus memuat:

- a. Pengendalian intern, diantaranya adalah pemisahan fungsi sehingga tercipta kondisi saling cek antar fungsi.
- b. Sistem review dan operasi yang memadai bagi sistem komputer, sehingga memungkinkan komputer tersebut untuk mendeteksi *fraud* secara otomatis.

Hal-hal yang menunjang terciptanya sistem tersebut adalah:

- Desain sistem harus mencakup fungsi pengendalian yang memadai.
 - Harus ada prinsip-prinsip pemisah fungsi.
 - Ada *screening* (penelitian khusus) terhadap komputer dan karyawan pada saat rekrutmen dan pelatihan.
 - Adanya pengendalian atas akses dalam komputer maupun data.
- c. Adanya prosedur mendeteksi *fraud* secara otomatis (*built in*) dalam sistem, mencakup:
 - Prosedur yang memadai untuk melaporkan *fraud* yang ditemukan.
 - Prosedur yang memadai untuk mendeposisikan setiap individu yang terlibat *fraud*.

Memproses dan menindak setiap individu yang terlibat *fraud* secara cepat dan konsisten, akan menjadi faktor penangkal (*deterrence*) yang efektif bagi individu lainnya. Sebaliknya, jika terhadap individu

yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan mendorong individu lain untuk melakukan *fraud*.

3. Organisasi

- a. Adanya *audit committee* yang independen menjadi nilai plus.
- b. Unit audit internal mempunyai tanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara berkala atas aktivitas organisasi secara berkesinambungan. Bagian ini juga berfungsi untuk menganalisis pengendalian intern dan tetap waspada terhadap *fraud* pada saat melaksanakan audit.
- c. Unit audit internal harus mempunyai akses ke *audit committee* maupun manajemen puncak. Walaupun pimpinan auditor internal tidak melapor ke senior manajemen puncak, akan tetapi untuk hal-hal yang sifatnya khusus, ia harus dapat langsung akses ke pimpinan yang lebih tinggi.
- d. Auditor internal harus mempunyai tanggung jawab yang setara dengan jajaran eksekutif, paling tidak memiliki akses yang independen terhadap unit rawan *fraud*.

4. Teknik Pengendalian

Sistem yang dirancang dan dilaksanakan secara kurang baik akan menjadi sumber atau peluang terjadinya *fraud*, yang pada gilirannya menimbulkan kerugian finansial bagi organisasi.

Berikut ini disajikan teknik-teknik pengendalian dan audit yang efektif untuk mengurangi kemungkinan *fraud*.

- a. Pembagian tugas yang jelas, sehingga tidak ada satu orang pun yang menguasai seluruh aspek dari suatu transaksi.
- b. Pengawasan memadai
- c. Kontrol yang memadai terhadap akses ke terminal komputer, terhadap data yang ditolak dalam pemrosesan, maupun terhadap program-program serta media pendukung lainnya.
- d. Adanya manual pengendalian terhadap *file-file* yang dipergunakan dalam pemrosesan komputer ataupun pembuangan *file (disposal)* yang sudah tidak terpakai.

5. Kepekaan terhadap *fraud*

Kerugian dan *fraud* dapat dicegah apabila organisasi atau instansi mempunyai staff yang berpengalaman dan mempunyai "SILA" (*Suspicious, Inquisitive, Logikal, and Analytical Mind*), sehingga mereka peka terhadap sinyal-sinyal *fraud*. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menumbuh-kembangkan "SILA" adalah:

- a. Kualifikasi calon pegawai harus mendapat perhatian khusus, bila dimungkinkan menggunakan referensi dari pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan mereka.
- b. Implementasikan prosedur curah pendapat yang efektif, sehingga para pegawai yang tidak puas mempunyai jalur untuk mengajukan protesnya. Dengan demikian, para karyawan merasa diperhatikan

dan mengurangi kecenderungan mereka untuk berkonfrontasi dengan organisasi.

- c. Setiap pegawai selalu diingatkan dan didorong untuk melaporkan segala transaksi atau kegiatan pegawai lainnya yang mencurigakan. Rasa curiga yang beralasan dan dapat dipertanggung jawabkan harus ditumbuhkan. Untuk itu perlu dijaga kerahasiaan sumber-sumber/orang yang melapor. Dari pengalaman yang ada terlihat bahwa *fraud* biasanya diketahui berdasarkan laporan informal dan kecurigaan dari sesama kolega.
- d. Para karyawan hendaknya tidak diperkenankan untuk lembur secara rutin tanpa pengawasan yang memadai. Bahkan di beberapa perusahaan Amerika Serikat, lembur dianggap sebagai indikasi ketidakefisienan kerja sebanyak mungkin harus dikurangi/dihindari. Dengan penjadwalan dan pembagian kerja yang baik, semua pekerjaan dapat diselesaikan pada jam-jam kerja.
- e. Karyawan diwajibkan cuti tahunan setiap tahun. Biasanya pelaku *fraud* memanipulasi sistem tertentu untuk menutupi perbuatannya. Hal ini dapat terungkap pada saat yang bersangkutan mengambil cuti tahunannya, dan tugas-tugasnya diambil alih oleh karyawan lain. Bila mungkin, lakukan rotasi pegawai periodik untuk tujuan yang sama.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:37), pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*) yaitu:

- “1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.
2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.
3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan”.

Dengan adanya upaya pencegahan yang diterapkan oleh perusahaan dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud* karena setiap tindakan *fraud* dapat terdeteksi dengan cepat dan diantisipasi dengan baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan *fraud* yang dapat merugikan banyak pihak.

2.1.4.5 Tujuan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Adanya penerapan *Good Corporate Governance* membuat sejumlah perusahaan mengeluarkan kebijakan terkait dengan upaya pencegahan *fraud*. Salah satu cara tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada Audit Internal untuk mendeteksi dan mencegah *fraud* yang mungkin terjadi dalam lingkungan organisasi. Apabila teknik pencegahan *fraud* berjalan baik dan efektif akan membuat citra positif bagi perusahaan karena meningkatnya kepercayaan publik.

Fraud merupakan suatu masalah di dalam perusahaan dan harus dicegah sedini mungkin. Amin Widjaja Tunggal (2012:59) mengemukakan bahwa terdapat tata kelola untuk mencegah *fraud* diantaranya adalah sebagai berikut:

- “1. Budaya jujur dan etika yang tinggi
2. Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan *fraud*
3. Pengawasan oleh komite audit”.

Adapun penjelasan dari tata kelola pencegahan *fraud* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Budaya jujur dan etika yang tinggi

Riset menunjukkan bahwa cara paling efektif untuk mencegah dan menghalangi *fraud* adalah mengimplementasikan program serta pengendalian anti *fraud*, yang didasarkan pada nilai-nilai inti yang dianut perusahaan. Nilai-nilai semacam itu menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku dan ekspektasi yang dapat diterima, bahwa pegawai dapat menggunakan nilai itu untuk mengarahkan tindakan mereka. Nilai-nilai itu membantu menciptakan budaya jujur dan etika yang menjadi dasar bagi tanggung jawab pekerjaan para karyawan.

2. Tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan *fraud*.

Fraud tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesempatan untuk melakukannya dan menyembunyikan perbuatan itu. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencegah *fraud*, mengambil langkah-langkah yang teridentifikasi untuk mencegah *fraud*, serta memantau pengendalian internal yang mencegah dan mengidentifikasi *fraud*.

3. Pengawasan oleh komite audit

Komite audit mengemban tanggung jawab utama mengawasi pelaporan keuangan serta proses pengendalian internal organisasi. Dalam memenuhi tanggung jawab ini komite audit memperhitungkan potensi diabaikannya pengendalian internal oleh manajemen serta mengawasi proses pencegahan *fraud* oleh manajemen, dan program serta pengendalian anti *fraud*. Komite audit juga membantu menciptakan “*Tone at the Top*” yang efektif tentang pentingnya kejujuran dan perilaku etis dengan mendukung toleransi nol manajemen terhadap *fraud*.

2.1.4.6 Pendeteksian Kecurangan (*Fraud*)

Pada dasarnya tindak *fraud* dapat dibongkar oleh audit karena adanya indikasi awal serta perencanaan yang baik untuk menyingkap segala sesuatu mengenai tindak *fraud* yang mungkin terjadi, tim audit harus memiliki intuisi yang tajam melihat berbagai aspek internal perusahaan yang rawan terjadi *fraud*. Namun, di sini audit tidak mungkin bekerja hanya berdasarkan metode audit yang baku. Selain menerapkan yang berbasis risiko, audit juga perlu mengembangkan aktivitas jaringan “mata-mata”. Dan yang terakhir ini tidak mungkin dijalankan sendiri oleh para Audit Internal, yang identitasnya mudah diketahui di tengah perusahaan. Karena itu, diperlukan upaya terintegrasi untuk membangun kedekatan emosional dengan orang-orang tertentu yang nantinya diharapkan berpihak pada tim audit.

Valery G. Kumaat (2011:156) menyatakan bahwa:

“Mendeteksi *fraud* adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak *fraud*, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku *fraud* (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit)”.

Dari definisi di atas sudah jelas bahwa pendeteksian *fraud* merupakan suatu deteksi awal yang harus dilakukan agar tindak *fraud* dapat dicegah untuk tidak dilakukan, dan untuk mengetahui perlu tidaknya dilakukan pengujian.

Upaya pendeteksian ini bisa berlangsung dalam waktu relatif cepat, tetapi harus membutuhkan kesabaran hingga berbulan-bulan. Menurut Valery G. Kumat (2011:156) menyimpulkan bahwa cepat atau lambatnya pendeteksian bergantung pada:

1. Faktor di pihak pelaku, yaitu kemampuan menyiasati sistem atau menutup celah dari praktek *fraud*nya, sehingga menentukan tingkat kerumitan suatu tindak *fraud*.
2. Faktor yang ditentukan oleh kapasitas auditor sendiri yaitu kemampuannya mengembangkan audit berbasis resiko (*risk based audit*) dan membangun jaringan informasi (*audit intelligent*) dengan tetap bersikap hati-hati”.

1.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu mengenai Audit Internal dan kaitannya dengan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Todd DeZoort, 2008	An Evaluation of Internal Auditor Responsibility for Fraud Detection	Deskriptif, analisis kuantitatif	Memiliki pengaruh
2.	Gusnardi, 2009	Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal, dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan	Derifikatif, kualitatif	Adanya pengaruh yang signifikan
3.	Adimas Luhur T, 2010	Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan (Studi Kasus Pada PT PLN Distribusi Jawa Barat-Banten)	Deskriptif, analisis kuantitatif	Memiliki pengaruh signifikan
4.	Hermi Yetti, 2010	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang	Deskriptif, metode analisis	Memiliki pengaruh signifikan
5	Rica Astria Putri, 2013	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Kas Pada PT PLN (Perseo) UPJ Banjarmasin	Deskriptif asosiatif	Ada pengaruh yang signifikan
6.	Evi Herawati, 2013	Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pendeteksian <i>Fraud Assets Misappropriation</i> (Survey Pada Auditor Internal BUMN yang berpusat di Kota Bandung)	Deskriptif asosiatif, kuantitatif	Adanya pengaruh yang signifikan

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Todd DeZoort, 2008	An Evaluation of Internal Auditor Responsibility for Fraud Detection	Variabel independen	Variabel dependen, dimensi variabel independen dan dependen
2.	Gusnardi, 2009	Pengaruh Peran Komite Audit, Pengendalian Internal, Audit Internal, dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pencegahan Kecurangan	Variabel dependen	Variabel independen, dimensi variabel independen dan dependen
3.	Adimas Luhur T, 2010	Peranan Audit Internal Dalam Pencegahan Kecurangan (Studi kasus pada PT PLN Distribusi Jawa Barat-Banten)	Variabel independen dan dependen	Dimensi variabel independen dan dependen
4.	Hermi Yetti, 2010	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang	Variabel independen	Dimensi variabel independen
5.	Rica Astria Putri, 2013	Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Kas Pada PT PLN (Perseo) UPJ Banjarmasin	Variabel dependen	Dimensi variabel independen
6.	Evi Herawati, 2013	Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pendeteksian <i>Fraud Assets Misappropriation</i> (Survey Pada Auditor Internal BUMN yang berpusat di Kota Bandung)	Dimensi variabel independen	Variabel independen

1.3 Kerangka Pemikiran

Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan meningkatkan efisiensi kerja. Untuk mencapai efisiensi kerja ini, salah satu alat pengukurannya adalah mencegah dan mengatasi kecurangan (*fraud*). Dimana untuk mencegah dan mengatasi *fraud* ini diantaranya perlu peran seorang Audit Internal.

Menurut Hery (2010:20) Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa audit intern merupakan suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran kepada manajemen.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:65) Audit Internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti *fraud* telah berjalan efektif. Aktivitas Audit Internal dapat mencegah sekaligus mengatasi *fraud*.

Sedangkan menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:36) Audit Internal memiliki peranan dalam:

- a. Mencegah *Fraud* (*Fraud Prevention*)
- b. Pendeteksian *Fraud* (*Fraud Detection*)

Pengertian *fraud* adalah bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar, apabila suatu kesalahan adalah disengaja

maka kesalahan tersebut merupakan *fraud (fraudulent)*. Adapun pengertian *fraud* menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:2) adalah sebagai berikut:

“*Fraud*, sebagaimana yang umumnya dimengerti dewasa ini, berarti ketidakjujuran dalam bentuk suatu penipuan yang disengaja atau suatu kesalahan penyajian yang dikehendaki atas suatu fakta yang material”.

Penelitian yang dilakukan penulis mengenai pengaruh Audit Internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) ini menyebutkan bahwa Audit Internal berfungsi membantu manajemen dalam mencegah dan mengatasi *fraud* yang terjadi di suatu organisasi/perusahaan. Tindakan *fraud* dapat dicegah dengan cara menciptakan budaya kejujuran, sikap keterbukaan dan meminimalisasi kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud*. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan *symptom fraud* yang berpotensi terjadi di lingkungan perusahaan BUMN serta peranan Audit Internal dalam mencegah dan mengatasi terjadinya *fraud*.

Pada umumnya perusahaan memiliki bagian yang bertugas melaksanakan audit laporan keuangan dan operasi manajemen yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah. Kondisi serupa juga terjadi pada perusahaan swasta, walaupun tidak ada aturan khusus akan tetapi cukup banyak perusahaan yang menyadari akan kebutuhan adanya Audit Internal. Audit Internal memiliki peran dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya *fraud*.

Kasus *fraud* yang semakin marak terjadi membuat kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Apabila *fraud* tidak bisa dicegah dan diatasi, maka akan

berakibat fatal bagi perusahaan. Untuk itu manajemen perusahaan harus mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi dan mencegah terjadinya *fraud*.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:13), pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*.”

Pusdiklatwas BPKP (2008:38) menyatakan beberapa metode pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup beberapa langkah berikut:

- “1. Penetapan kebijakan anti *fraud*
2. Prosedur pencegahan baku
3. Organisasi
4. Teknik Pengendalian
5. Kepekaan terhadap *fraud*”.

Pencegahan *fraud* menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:37) merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud* (*fraud triangle*), yaitu:

- “1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.
2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.
3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas tindakan *fraud* yang dilakukan”.

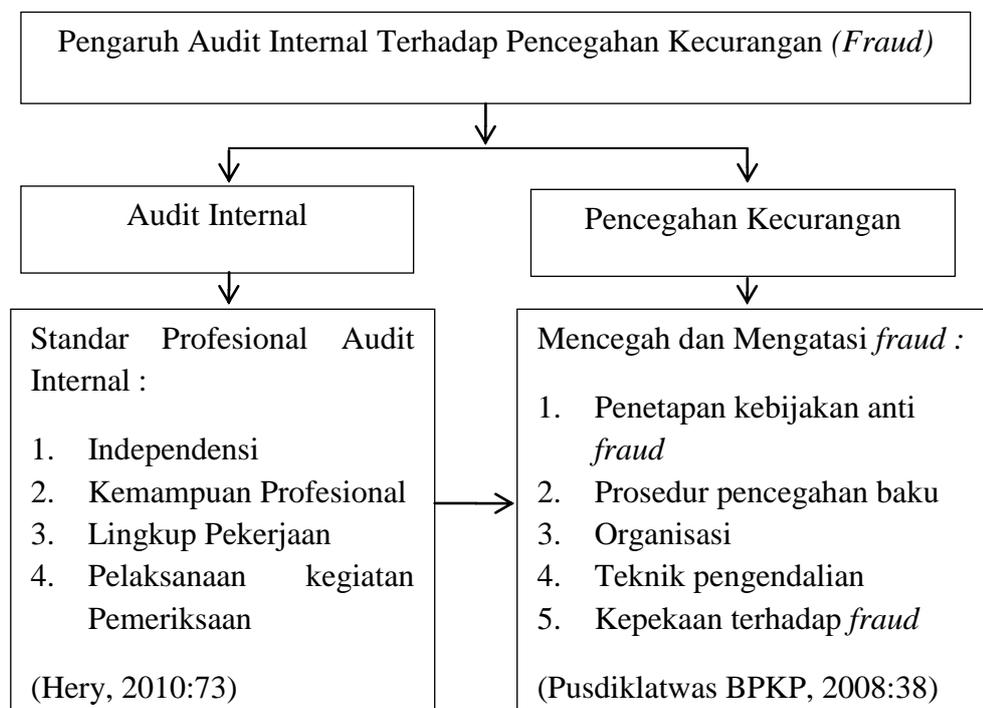
Untuk menangani masalah kecurangan ini, diperlukan monitoring. Untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan audit internal yang baik. Audit internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang.

Menurut Hery (2010:64), audit internal perusahaan yang lemah dan tidak kompeten akan mengakibatkan pencegahan kecurangan dalam perusahaan tersebut tidak berjalan baik dan efektif. Namun sebaliknya audit internal yang

kuat dan kompeten dapat mendorong pencegahan kecurangan dalam suatu perusahaan berjalan dengan baik dan efektif sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diperkecil. Keefektifan audit internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan terjadinya kecurangan, dengan adanya audit internal maka pengecekan akan terjadi secara otomatis terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain.

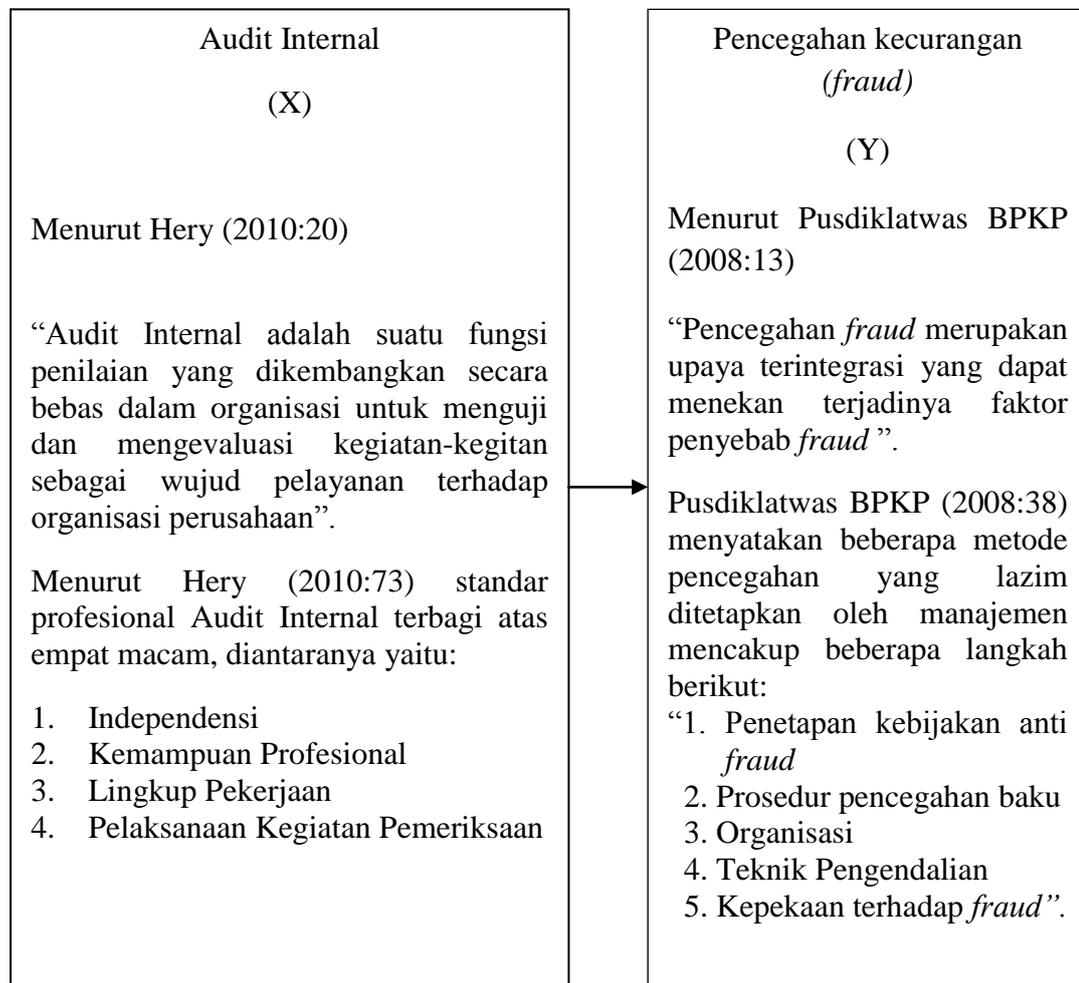
Dengan adanya upaya pencegahan yang diterapkan oleh perusahaan dapat memperkecil peluang terjadinya *fraud* karena setiap tindakan *fraud* dapat terdeteksi dengan cepat dan diantisipasi dengan baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan *fraud* yang dapat merugikan banyak pihak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Paradigma Penelitian



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis yang akan dibuktikan melalui penelitian ini, sebagai berikut:

“Terdapat pengaruh yang signifikan audit internal terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).”